

**ANALISIS POTENSI DAN KINERJA DINAS PENGELOLAAN
PASAR KOTA SURAKARTA**

TESIS



OLEH :

SATOTO MARTONO

NIM : P 100040065

**MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006**

**ANALISIS POTENSI DAN KINERJA DINAS PENGELOLAAN
PASAR KOTA SURAKARTA**

T E S I S

**Diajukan kepada
Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Magister Manajemen**

OLEH :

SATOTO MARTONO

NIM : P 100040065

**MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006**

T E S I S

**ANALISIS POTENSI DAN KINERJA DINAS PENGELOLAAN
PASAR KOTA SURAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

SATOTO MARTONO

NIM : P 100040065

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Dewan Penguji

.....

.....

Pembimbing Pendamping

.....

.....

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen

Tanggal

Ketua Program MM UMS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SATOTO MARTONO**

NIM : P 100040065

Judul Tesis : **ANALISIS POTENSI DAN KINERJA DINAS
PENGELOLAAN PASAR KOTA SURAKARTA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,

SATOTO MARTONO

INTISARI

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung potensi dan kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta selama periode 2001-2005 terhadap pemungutan retribusi pasar.

Hasil analisa menunjukkan bahwa persentase yang dicapai Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta selama periode penelitian adalah antara target dengan potensi retribusi pasar menunjukkan angka yang sangat baik. Tingkat penghitungan efektivitas pemungutan retribusi pasar Kota Surakarta termasuk kategori sangat efektif. Tingkat penghitungan efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kota Surakarta menunjukkan bahwa tingkat efisiensi retribusi pasar termasuk dalam kategori sangat efisien.

Kata kunci: Potensi, Kinerja, Efektif, dan Efisien.

ABSTRACT

Dinas Pengelolaan Pasar have task of governance to manage market aspect. The aim of this research is to account potency and performance Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta city during 2001-2005 to take market retribution.

The result of the analysis shows that the percentage reach of Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta during research period that target and potency of market retribution show very good result. The level account of effective market retribution of Surakarta city is very effective category. The level account of efficient market retribution of Surakarta city is very efficient category.

Key word: Potency, Performance, Effective, and Efficient.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar - besarnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program Magister Manajemen pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judul penelitian yang diajukan: **ANALISIS POTENSI DAN KINERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA SURAKARTA.**

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian atas bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini ijinilah penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Wahyuddin, MS, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Dr. Ir. Didik Purwadi, MEc selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi kelancaran penulisan Tesis ini.
3. Segenap Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Istri tercinta, serta anak – anakku tersayang yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga dapat menyelesaikan dengan baik tesis ini.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta beserta staf yang telah berkenan membantu dan mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian pada lembaga tersebut.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini sehingga penulis sangat terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta bagi pihak yang terkait.

Surakarta, Juli 2006

SATOTO MARTONO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Hipotesis.....	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II. LANDASAN TEORI.....	7
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7
B. Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Surakarta.....	7
C. Retribusi Pasar	10

	D. Penilaian Retribusi	12
	E. Kerangka Pemikiran	14
	F. Potensi, Efektifitas, dan Efisiensi	15
BAB III.	METODE PENELITIAN.....	16
	A. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
	B. Jenis dan Sumber Data.....	16
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	16
	D. Metode Analisis Data.....	17
	E. Definisi Operasional	20
	F. Instrumen Penelitian	21
BAB IV.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	22
	A. Sejarah dan Perkembangan Dinas Pengelolaan Pasar.....	22
	B. Kondisi Sektor Perdagangan Kota Surakarta.....	25
	C. Tugas Struktural Pada Dinas Pengelolaan Pasar.....	29
	D. Analisis Deskriptif	33
	C. Hasil Analisis Data dan Pembahasan.....	38
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
	A. Kesimpulan	48
	B. Saran-Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah dan Kelas Pasar Kota Surakarta.....	24
Tabel 4.2 PDRB Kota Surakarta Tahun 2000-2004 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Dalam Jutaan Rupiah).....	26
Tabel 4.3 Perkembangan Usaha Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2000 - 2004.....	27
Tabel 4.4 Nilai Ekspor Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2001-2005.....	48
Tabel 4.5 Nilai Investasi Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2001-2005.....	29
Tabel 4.6 Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, 2001-2005.....	34
Tabel 4.7 Pertumbuhan PAD, Retribusi Daerah dan Retribusi Pasar Kota Surakarta Tahun 2001-2005	36
Tabel 4.8 Kontribusi Jenis-Jenis Retribusi Daerah Terhadap Total Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2005.....	37
Tabel 4.9 Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Retribusi Pasar Kota Surakarta	39
Tabel 4.10 Struktur Tarif Retribusi Pasar Kota Surakarta.....	40
Tabel 4.11 Potensi dan Target Retribusi Pasar Kota Surakarta Tahun 2001-2005	42
Tabel 4.12 Efektivitas Retribusi Pasar Kota Surakarta Tahun 2001-2005.....	44
Tabel 4.13 Tingkat Efisiensi Retribusi Pasar Kota Surakarta Tahun 2001-2005..	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Potensi dan Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Potensi dan Target Retribusi Pasar Kota Surakarta Tahun 2001-2005

Lampiran 2 Efisiensi Retribusi Pasar Kota Surakarta Tahun 2001-2005

Lampiran 3 Potensi Plataran, Los, dan Kios Kota Surakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah membawa dimensi baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2000: 45) bahwa otonomi daerah harus diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak sebatas pada pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada daerah kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pemerintah daerah diharapkan mampu mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan, menentukan kebijakan pembangunan serta pendanaan sehingga dapat merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber potensi yang dimiliki daerah. Artinya adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah bukanlah pelimpahan kewenangan dan pembiayaan saja tetapi pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola daerah dengan efisien dan efektif berdasarkan potensi yang dimiliki.

Ciri utama dari suatu daerah yang mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali dan mengelola keuangan sendiri yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Ada hal yang lebih penting dari pemberlakuan undang-undang tersebut yaitu daerah memiliki keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa secara garis besar penerimaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Tidak Asli Daerah. Pendapatan Tidak Asli Daerah bersumber dari hibah, dana alokasi umum dan dana perimbangan (Halim, 2002: 65).

Pada dasarnya bahwa pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kapasitas keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya yang meliputi pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan perlindungan kepada masyarakat. Penerimaan daerah harus didukung oleh Pendapatan Asli Daerah yang memadai. Kenyataan yang ada saat ini adalah bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah masih relatif kecil

sehingga perlu dilakukan penghitungan potensi PAD riil yang dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional (Mardiasmo, 2001: 6).

Melihat keterbatasan yang ada dalam Pendapatan Asli Daerah maka prioritas penggunaannya adalah untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyediaan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah seharusnya mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas berdasarkan potensi yang ada. Pemerintah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan dan pendanaannya. Dengan demikian pemerintah menarik pajak dan pungutan lainnya (Reksohadiprodjo: 36).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PAD bagi kabupaten/kota di Indonesia. Salah satunya adalah kota Surakarta yang dikenal sebagai pusat perdagangan, industri dan jasa sehingga PAD sangat dipengaruhi oleh pajak dan retribusi. Kota Surakarta tidak memiliki sumber daya alam yang memadai sebagai sumber pendanaan pembangunan, dengan demikian pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lainnya termasuk didalamnya PAD. Artinya bahwa keberadaan pajak dan retribusi daerah Kota Surakarta memiliki kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa retribusi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap PAD dan yang akan diteliti adalah retribusi yang diperoleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta melalui pemungutan retribusi pasar. Sebagai salah satu dinas yang mengelola retribusi maka Dinas Pengelolaan

Pasar Kota Surakarta memiliki peran penting dalam pembangunan. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk setoran retribusi pasar terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian sebagai dinas daerah maka keberadaan dan kegiatan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta harus dapat dioptimalkan.

Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dapat dicapai tidak harus melalui penambahan beban bagi masyarakat. Perhitungan potensi, efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang antara lain dapat dilakukan melalui penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi bagi para penghindar retribusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan menghitung potensi dan kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam pemungutan memperoleh retribusi pasar. Dengan demikian perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah bagaimana potensi dan kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta selama periode 2001-2005 terhadap pemungutan retribusi pasar.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung potensi dan kinerja Dinas

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta selama periode 2001-2005 terhadap pemungutan retribusi pasar.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan bagi pejabat pada Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi pasar;
2. Sebagai bahan perbandingan bagi penulis antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang ada di lapangan;
3. Sebagai bahan informasi bagi instansi atau pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut;

D. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah dan masih harus dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan dan analisa data penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa potensi dan kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan apakah potensi dan kinerja unit kerja tersebut telah efektif dan efisien.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesa, dan sistematika penulisan. Bab : II Landasan Teori, akan diuraikan Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Surakarta, Retribusi Pasar,

Penilaian Retribusi, dan Kerangka Pemikiran. Bab III : Metode Penelitian, akan menguraikan obyek penelitian, metode pengumpulan data, dan definisi operasional. Bab IV : Analisa Data dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang data hasil penelitian. Bab V : Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran bagi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.